

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Seiring diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 melalui Undang-Undang No.2 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, reformasi aspek keuangan Negara baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.25 Tahun 1999 yang telah direvisi, Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, tidak terhenti sampai disitu selanjutnya reformasi pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah salah satunya ditetapkan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government governance*), pemerintah harus terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, salah satunya dengan penyempurnaan kebijakan akuntansi secara menyeluruh. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan menerbitkan perangkat/peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan Negara/daerah. Kebijakan akuntansi meliputi prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Beberapa jenis kebijakan akuntansi dapat digunakan untuk subjek yang sama. Pertimbangan dan atau pemilihan perlu disesuaikan dengan kondisi pemerintahan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan

menggambarkan realitas ekonomi perusahaan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi.

Laporan Keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010). Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu standar penyusunan laporan keuangan milik pemerintah yang disusun dalam bentuk prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Laporan Keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Begitu juga dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor Pemerintah dalam hal ini BPK dapat memberikan 4 macam opini yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan menolak memberikan opini atau tidak memberikan pendapat (*Disclaimer*). Ketika Badan Pemeriksa Keuangan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini berarti Laporan Keuangan yang dilaporkan oleh pihak Daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan Laporan Keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) tahun 2014 (<http://www.bpk.go.id>), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013 menggambarkan hasil Opini Wajar dengan Pengecualian(WDP) Dengan Paragraf Penjelas (DPP). Namun masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan pemerintah Sumatera Utara dalam melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang ada. Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan diantaranya persoalan tanah milik pemerintah Sumatera utara yang banyak digarap dan diklaim milik masyarakat dan masih banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah baik itu masalah dari daerah-daerah yang mencakup wilayah Sumatera utara. Kondisi itu mengakibatkan adanya gugatan dari masyarakat kepada pemerintah, hal itu perlu diselesaikan dengan cepat, sehingga penyajian Laporan Keuangan semakin baik dimasa mendatang.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki kebijakan akuntansi yang handal. Kebijakan akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Berkaitan dengan yang ditegaskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan bahwa diperlukan percepatan perbaikan dari kebijakan akuntansi melalui sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dalam langkah-langkah yang nyata, terprogram dan mengikutsertakan berbagai kalangan tidak hanya dari pemerintah daerah saja. Yang hasilnya akan mendukung aparatur pemerintah dalam membuat Laporan Keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan teori dan uraian diatas dan didukung dengan fakta-fakta yang ada, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam tentang **“Pengaruh Kebijakan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera utara.**

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Menurut Moh. Nazir :

**Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduan arti (*ambiguity*), adanya halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*) baik antar kegiatan atau fenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada.**<sup>1</sup>

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini

adalah:

- Apakah Kebijakan Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan pada Pemerintahan Provinsi Sumatera utara?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Sumatera utara.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti bagi daerah yang menjadi lokasi penelitian, yaitu:

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan akan laporan keuangan Pemerintah kota terutama berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan kualitas laporan keuangan.
2. Bagi pemerintah daerah yang menjadi lokasi penelitian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan kebijakan akuntansi dalam kualitas laporan keuangan.

---

<sup>1</sup>Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, cetakan Keenam : Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2005, hal. 111

3. Bagi pihak lain, penelitian ini sebagai bahan informasi mengenai sejauh mana kualitas pengelolaan Laporan Keuangan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kebijakan Akuntansi**

**Kebijakan akuntansi merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh badan pemerintah, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Keuangan yang bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang memberikan cara dalam hal mengatur aktivitas ekonomi, khususnya mengenai informasi keuangan.<sup>2</sup>**

---

<sup>2</sup>Ridwan Iskandar, 2009, **Kebijakan akuntansi,**  
*<http://ridwaniskandar.files.wordpress.com/2015/05/15-kebijakan-akuntansi.pdf>*

Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Beberapa jenis kebijakan akuntansi dapat digunakan untuk subjek yang sama. Pertimbangan dan atau pemilihan perlu disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi perusahaan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi.

### 2.1.1 Pengertian Kebijakan Akuntansi

Pengertian kebijakan akuntansi menurut Elden S Hendriksen diterjemahkan oleh Marianus Sinaga (1996:109) mengatakan bahwa: **“Kebijakan akuntansi adalah proses pemilihan metode pelaporan, alternatif, sistem pengukuran dan teknik pengungkapan tertentu diantara semua yang mungkin tersedia untuk pelaporan keuangan oleh suatu perusahaan”**<sup>3</sup>

Proses penetapan kebijakan ekonomi dan sosial dimana suatu kebijakan itu akan beroperasi. Sasaran pilihan kebijakan akuntansi yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi perusahaan industry secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi.

Dengan demikian kebijakan akuntansi mempunyai peranan penting dalam membantu organisasi perusahaan industry dalam menjalankan kegiatannya, yaitu mencapai tujuan perusahaan dengan memperoleh pendapatan yang optimal guna kelangsungan hidup perusahaan.

Secara singkat tujuan kebijakan akuntansi berfokus pada para pemakai informasi keuangan. Akan tetapi hal ini hanya mungkin dilakukan melalui cara umum dengan menggunakan cara parsial dari teori - teori induktif deduktif atau dari analisa penelitian dalam bentuk pemrosesan informasi individu. Kesulitannya adalah bahwa pendapatan individu, badan (perusahaan) dan kelompok tidak dapat dikombinasikan untuk membentuk suatu pendapatan secara keseluruhan yang unik. Alternatifnya adalah memfokuskan tujuan kebijakan akuntansi pada konsekuensi yang menguntungkan dan merugikan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi paling tidak penyeimbang. Ini menetapkan tujuan yang benar bagi penetapan kebijakan akuntansi.

### 2.1.2 Tujuan Kebijakan Akuntansi

---

<sup>3</sup>Elden S Hendriksen diterjemahkan oleh Marianus Sinaga. **Kebijakan Akuntansi**, Buku Pertama, Salemba Empat, Jakarta. 1996. Hal 109

Tujuan Kebijakan Akuntansi diantaranya dibagi menjadi dua jenis yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, seperti yang diuraikan dibawah ini:

1. Tujuan umum kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
2. Tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi:
  - a. Penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar;
  - b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - c. Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi.

Faktor-faktor lainnya yang harus dipertimbangkan dalam bentuk kerangka kebijakan akuntansi hanyalah salah satu informasi keuangan bagi individu. Keputusan mengenai kebijakan akuntansi harus mempertimbangkan sumber-sumber alternatif diluar akuntansi yang menyajikan informasi yang tersedia secara lebih efisien dan dengan biaya yang lebih rendah bagi perusahaan dan investor. Secara singkat tujuan kebijakan akuntansi berfokus pada para pemakai informasi keuangan.

Akan tetapi hal ini hanya mungkin dilakukan melalui cara umum dengan menggunakan cara parsial dari teori - teori induktif deduktif atau dari analisa penelitian dalam bentuk pemrosesan informasi individu. Kesulitannya adalah bahwa pendapatan individu, badan (perusahaan) dan kelompok tidak dapat dikombinasikan untuk membentuk suatu pendapatan secara keseluruhan yang unik. Alternatifnya adalah memfokuskan tujuan kebijakan akuntansi



pada konsekuensi yang menguntungkan dan merugikan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi paling tidak penyeimbang. Ini menetapkan tujuan yang benar bagi penetapan kebijakan akuntansi.

Kebijakan akuntansi dibuat untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi:

1. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan; dan
2. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
  - a. mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan organisasi;
  - b. menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
  - c. netral yaitu bebas dari berpihakan;
  - d. mencerminkan kehati-hatian; dan
  - e. mencakup semua hal yang material.

### **2.1.3 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah**

Kebijakan akuntansi merupakan instrument penting dalam penerapan akuntansi akrual. Dokumen yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah ini harus dipedomani dengan baik oleh fungsi- fungsi akuntansi, baik di SKPkd maupun SKPD. Selain itu, dokumen ini juga dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti perencana dan tim anggaran pemerintah daerah.

Menurut peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, kebijakan akuntansi adalah: **“Prinsip-prinsip, dasar- dasar, konvensi- konvensi, aturan-**

**aturan, dan praktik- praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan”.**<sup>4</sup>

Memperhatikan sifatnya yang strategis, penyusunan kebijakan akuntansi harus menjadi perhatian semua pihak. Dalam pembahasannya, perlu dijelaskan setiap dampak dari metode yang dipilih, baik pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional serta dapat diantisipasi implementasinya. Praktek selama ini menunjukkan banyak kebijakan akuntansi disusun dengan menuliskan kembali hampir seluruh isi standar akuntansi pemerintahan. Praktek seperti ini menimbulkan inefisiensi karena adanya pengulangan (redundancy) antara SAP yang diatur oleh peraturan pemerintah dan kebijakan akuntansi yang diatur oleh peraturan kepala daerah. Oleh karena itu Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat mengambil unsur-unsur pokok dari SAP, lalu mengembangkan dalam pilihan-pilihan metode, baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

#### **2.1.4 Pengakuan Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh suatu pemerintah daerah perlu diperhatikan kesesuaiaanya dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Identifikasi ini sangat menentukan penyesuaian yang harus dilaksanakan. Berikut ini beberapa kebijakan akuntansi penting yang seringkali belum sepenuhnya sesuai dengan SAP.

##### **1. Pengakuan Pendapatan dan Belanja**

SAP menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja. Pendapatan diakui setelah penerimaan uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Belanja diakui setelah uang dikeluarkan secara definitif dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau telah

---

<sup>4</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP

dipertanggungjawabkan. Kepmendagri No. 29/2002 menyatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan untuk mengakui pendapatan dan belanja adalah basis kas modifikasian.

Dalam basis kas modifikasian, akun pendapatan dan belanja dibuka dalam beberapa waktu setelah tutup tahun anggaran. Pendapatan yang diterima dalam kurun waktu yang ditetapkan diakui sebagai pendapatan dan belanja yang dibayar selama jangka waktu yang ditetapkan masih diakui sebagai belanja pada anggaran tahun tersebut. Dengan demikian maka sistem akuntansi akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca yang hanya memuat pos kas serta piutang dan utang yang berasal dari kegiatan operasi pemerintahan.

Pemerintah daerah perlu memperhatikan basis pengakuan pendapatan dan belanja yang digunakan dalam APBD masing-masing. Apabila Pemda telah menggunakan basis kas modifikasian, maka besarnya pendapatan dan belanja yang berasal dari selisih yang terjadi karena penggunaan basis yang berbeda tersebut dieliminasi. SAP belum mengakui kas yang berada di tangan Bendahara Penerimaan kas yang berada ditangan Bendahara Penerimaan per 31 Desember sebagai pendapatan karena belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula halnya dengan pengakuan belanja, belanja diakui pada saat teradinya pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Daerah. Pembayaran yang dilakukan secara langsung kepada pihak ketiga (SPMU LS atau BT) diakui sebagai belanja pada saat dikeluarkan uang dari Rekening Kas Umum Daerah. Pembayaran melalui uang muka kerja atau dana kas kecil (SPMU, BS, SPM PK atau SPM UP) yang diberikan kepada bendahara.

Pengeluaran/ Pemegang Kas merupakan uang muka kerja atau dana kas kecil disatuan kerja perangkat daerah. Jumlah tersebut baru diakui sebagai belanja setelah dipertanggungjawabkan ke satuan kerja pengelola keuangan daerah. Saldo kas yang berasal dari

siswa uang muka kerja, yang berada di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan aset pemerintah daerah dan disajikan pada akun Kas di Bendahara Pembayar di neraca pemerintah daerah.

## 2. Pengakuan Aset

Kepmendagri No.29/2002 mengatur bahwa pengakuan aset dilakukan pada akhir periode. Sementara SAP menyatakan bahwa aset diakui pada saat diterima dan/atau hak kepemilikan berpindah. Dengan demikian selama tahun berjalan terdapat perbedaan waktu pengakuan aset namun pada akhir periode akuntansi akan diperoleh saldo aset yang sama.

## 3. Pengakuan Kewajiban

Kepmendagri No.29/2002 menyatakan bahwa utang diakui pada akhir periode. SAP menyatakan bahwa kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima atau kewajiban muncul. Untuk meyakini bahwa seluruh utang sudah disajikan di neraca, pemerintah daerah dan setiap satuan kerja perangkat daerah perlu menginventarisasi utang-utang di unitnya masing-masing dan menyajikannya di neraca per 31 Desember.

### **2.1.5 Penyusunan Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat dilakukan melalui beberapa tahapan berdasarkan komponen utama kebijakan akuntansi sebagai berikut :

#### **1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan**

Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi terkait laporan keuangan dimulai dari pengumpulan rujukan atau referensi berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya:

- a. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
- b. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- c. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas;
- d. PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
- f. PSAP 12 tentang Laporan Operasional; dan
- g. IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporan keuangan.

Berdasarkan rujukan dan referensi tersebut dilakukan pemahaman dan analisa untuk melakukan proses penyesuaian dan harmonisasi sesuai kondisi dan kebutuhan pelaporan keuangan di pemerintah daerah. Hasil proses penyesuaian dan harmonisasi dicantumkan kedalam pernyataan-pernyataan pada kebijakan akuntansi pelaporan keuangan.

## **2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi**

Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi terkait akun dimulai dari mempelajari SAP khususnya pernyataan terkait akun-akun. Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya:

- a. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan;
- b. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi;
- c. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
- d. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- e. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
- f. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan; dan
- g. IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun.

Selain menelaah SAP, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan rujukan atau referensi berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi atas akun-akun yang terkait.

Penelaahan diatas digunakan untuk:

- a. Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pemilihan metode yang khusus atas pengakuan atau pengukurannya.
- b. Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan pengukurannya.
- c. Mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di dalam SAP namun dibutuhkan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Dalam menyusun hal-hal yang belum diatur di dalam SAP, perlu memperhatikan:
  - 1) PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait.
  - 2) Definisi serta kriteria pengakuan dan kriteria pengukuran atas aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP.

Hasil pemilihan metode, pengaturan lebih rinci dan pengaturan hal-hal yang belum diatur itulah yang kemudian dicantumkan dalam dokumen kebijakan akuntansi. Pemerintah daerah juga dapat melakukan diskusi yang bersifat terbatas dengan mengundang para ahli akuntansi pemerintahan atau para pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan obyektif dan membangun. Tim penyusun juga perlu melakukan penelaahan bersama-sama SKPD terkait dengan pembahasan akun-akun tertentu seperti pembahasan kapitalisasi pemeliharaan jalan bersama dinas terkait. Pemerintah daerah dapat mencantumkan kerangka konseptual SAP

berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pada bagian awal kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Pencantuman kerangka konseptual SAP dimaksudkan sebagai pemahaman dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menggunakan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

### **2.1.6 Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan**

Untuk memberikan gambaran bentuk penyajian kebijakan akuntansi pemerintah daerah, dibawah ini diuraikan mengenai kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

#### **1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan**

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

#### **2. Ruang Lingkup**

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

### 3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

#### 2.1.7 Pertimbangan Pemilihan Untuk Penerapan Kebijakan Akuntansi

**“Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen”<sup>5</sup>**

##### 1. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut harusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.

##### 2. Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realitas kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.

##### 3. Materialitas

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

---

<sup>5</sup>Ayum, **Kebijakan Akuntansi**, <http://nengrumz.blogspot.com/2015/10/rmk-teori-akuntansi.html>



Laporan keuangan harus jelas dan dapat dimengerti, berdasar pada kebijakan akuntansi yang berbeda di antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dalam satu negara maupun antar negara. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Pengungkapan hal ini sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, atau laporan lainnya terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

### **2.1.8 Keaneekaragaman Kebijakan Akuntansi dan Pengungkapannya**

Tugas interpretasi laporan keuangan sulit dilaksanakan jika menggunakan berbagai kebijakan beberapa bidang (akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan lain-lain) atau wilayah akuntansi yang berbeda (wilayah akuntansi per negara, kumpulan negara dan lain-lain).

Di dunia belum ada sebuah daftar tunggal kebijakan akuntansi dapat digunakan bersama-sama, sehingga para pemakai dapat memilih dari daftar tunggal itu, sehingga perbedaan pilihan kebijakan berdasar pertimbangan kejadian, syarat dan kondisi yang serupa.

Contoh berikut adalah bidang yang menimbulkan perbedaan kebijakan akuntansi dan karena itu diperlukan pengungkapan atas perlakuan akuntansi terpilih:

1. Umum, diantaranya adalah:
  - a. Kebijakan konsolidasi
  - b. Konversi atau penjabaran mata uang asing meliputi pengakuan keuntungan dan kerugian pertukaran
  - c. Kebijakan penilaian menyeluruh seperti harga perolehan, daya beli umum, nilai penggantian

- d. Peristiwa setelah tanggal neraca
- e. Sewa guna usaha, sewa beli atau transaksi cicilan dan bung
- f. Pajak
- g. Kontrak jangka panjang
- h. Franchise atau waralaba

## 2. Aktiva

- a. Piutang
- b. Persediaan (persediaan dan barang dalam proses) dan beban pokok penjualannya
- c. Aktiva dapat disusutkan dan penyusutan
- d. Tanaman belum menghasilkan
- e. Tanah yang dimiliki untuk pembangunan dan biaya pembangunan
- f. Investasi pada anak perusahaan, investasi dalam perusahaan asosiasi dan investasi lain
- g. Penelitian dan pengembangan
- h. Paten dan merek dagang
- i. Goodwill

## 3. Kewajiban dan Penyisihan

- a. Jaminan
- b. Komitmen dan kontinjensi
- c. Biaya pensiun dan tunjangan hari tua
- d. Pesangon dan uang penggantian

## 4. Keuntungan dan kerugian

- a. Metode pengakuan pendapatan

- b. Pemeliharaan, reparasi-perbaikan (repairs), dan penyempurnaan–penambahan (improvement)
- c. Untung-rugi penjualan aktiva
- d. Akuntansi Dana, wajib atau tak wajib, termasuk pembebanan dan pengkreditan langsung ke perkiraan surplus

Kebijakan akuntansi dewasa ini tidak secara teratur dan tidak secara penuh diungkapkan dalam semua laporan keuangan. Perbedaan besar masih terjadi dalam bentuk, kejelasan dan kelengkapan pengungkapan yang ada dalam suatu negara maupun antar negara atas kebijakan akuntansi harus diungkapkan. Dalam sebuah laporan keuangan, beberapa kebijakan akuntansi yang penting telah diungkapkan sementara kebijakan akuntansi yang penting lain tidak diungkapkan.

Bahkan pada negara-negara yang mewajibkan pengungkapan atas kebijakan akuntansi penting, tak selalu tersedia pedoman yang menjamin keseragaman metode pengungkapan. Pertumbuhan perusahaan multinasional dan pertumbuhan teknologi keuangan internasional telah memperbesar kebutuhan keseragaman laporan keuangan melewati batas negara.

Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan perlu diungkapkan, dampak perubahan secara kuantitatif harus dilaporkan. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

### **2.1.9 Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Perubahan kebijakan akuntansi terjadi jika terdapat perubahan pada salah satu komponen berikut:

1. kriteria pengakuan,
2. dasar pengukuran, dan
3. metode penyajian.

Jika tidak satupun dari komponen di atas yang berubah, maka perubahan tersebut dikategorikan sebagai perubahan estimasi.

Dalam rangka mencapai konsistensi dalam kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi pada dasarnya tidak diperkenankan, kecuali :

- 1) Dipersyaratkan oleh suatu PSAK (mandatory); atau
- 2) Menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas entitas. (voluntary)

Berikut ini bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi:

- 1) Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya; dan
- 2) Penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material.

#### **2.1.10 Basis Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah**

Kebijakan akuntansi disusun tiap pemda berdasar panduan penyusunan kebijakan akuntansi sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 Peraturan Menteri. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah wajib ditetapkan oleh sebuah perda sesuai Pasal 4 (4), terdiri atas (1) kebijakan pelaporan LK dalam berbagai PSAP 01, 02, 03, 04, 11 dan 12 yang menjadi unsur LK sesuai Pasal 4 (2), dan (2) kebijakan akuntansi terpilih oleh pemerintah daerah tersebut untuk setiap pos LK atau akun Buku Besar seperti PSAP 05, 06, 07, 08, 10, IPSAS dan Bultek terkait

PSAP tertentu, sesuai Pasal 4 (3) berlaku bagi entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam pemda tersebut. Untuk menjamin kelayakan penerapan PSAP 11, kebijakan pelaporan LK, kebijakan periode laporan, dan kebijakan akuntansi terpilih bagi entitas akuntansi pemda yaitu SKPD dan PPKD serta entitas pelaporan pemda tersebut, termasuk entitas BLUD sebagai *satker ber-kebebasan-khusus-tertentu*, haruslah tepat sama.

Berbagai hal penting dalam Panduan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Pengutipan SAP atau PSAP harus dilakukan secara terpilih dan berazas guna bagi pengguna Perda Kebijakan Akuntansi, sambil mewaspadaikan risiko perda menjadi terlampaui dan menjadi sulit diterapkan.**
- b. **Menyalin sebagian besar SAP dan/atau PSAP tertentu sebagai bagian Perda Kebijakan Akuntansi sedapat mungkin dihindari.**
- c. **Landasan berfikir *pemilihan suatu metode akuntansi yang paling tepat bagi suatu pemda tertentu* mungkin adalah berbagai buku teks akuntansi atau sumber lain yang berkualitas tinggi. Sebagian metode terpilih mungkin karena telah tercantum pada berbagai perda yang lain, misalnya perda tentang Manajemen Persediaan Pemda yang kebetulan mencakupi pula pilihan metode pencatatan akuntansi persediaan dengan segala pertimbangan teoritisnya. Dalam kasus seperti tersebut di atas, Peraturan Menteri mengizinkan bahwa Perda Kebijakan Akuntansi dapat menggunakan rujukan lain selain PP 71/2010, misalnya peraturan perundang-undangan dan pustaka terkait kebijakan akuntansi terpilih pemda tersebut. Sebaiknya sumber rujukan disebutkan dalam Perda Kebijakan Akuntansi. Perda nan bijak menghindari rujukan-rujukan yang bertentangan dengan PP 71/2010 dan berbagai rujukan tidak kompeten.**
- d. **Perda wajib *mengatur pelaporan dan kebijakan akuntansi untuk pos atau akun yang belum diatur secara eksplisit oleh SAP atau PSAP manapun yang de facto terdapat pada pemda tersebut, hendaknya mencoba mengambil hikmah PSAP yang mempunyai kesamaan, kemiripan, keserupaan (serupa tapi tak sama) dengan hal tersebut dengan berbagai bantuan pakar luar pemda seperti konsultan akuntansi, pengajar ilmu akuntansi, para pensiunan pemda, pakar akuntansi di dalam dan luar negeri.***
- e. **Bentuk kasat mata Perda Kebijakan sebaiknya mengikuti contoh tersaji pada Butir C Lampiran I Peraturan Menteri.<sup>6</sup>**

## 2.2 Penyajian Laporan Keuangan

---

<sup>6</sup>KSAP, Peraturan Daerah tentang Kebijakan Akuntansi <http://www.ksap.org/sap/peraturan-daerah-tentang-kebijakan-akuntansi/>

Mardiasmomemaparkan bahwa secara garis besar tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. **Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.**
2. **Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.**<sup>7</sup>

Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, keseuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lainnya yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi perancangan dan penganggaran.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

### **2.2.1 Definisi dan Konsep Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, "Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya

---

<sup>7</sup>Mardiasmo. **Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: Andi. 2004, hal 37

laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus.

Mardiasmo (2002:160) mengatakan **bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitas.**<sup>8</sup>

Pengguna laporan keuangan pemerintahan menurut *International Federation of Accountants-Public Sector Committee*(IFAC-PSC) dikelompokkan sebagai berikut:

1. Badan legislatif dan badan-badan lain yang kekuasaan mengatur dan mengawasi.

Badan legislatif merupakan pengguna utama dari laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan tersebut akan memberikan informasi, yang dapat membantu untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengurus sumber-sumber, ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dan kondisi keuangan maupun kinerja.

2. Rakyat

---

<sup>8</sup>Ibid. Hal 160

Rakyat merupakan kelompok terbesar dari pengguna laporan, yang terdiri dari para pembayar pajak, pemilih, serta kelompok-kelompok yang mempunyai ketertarikan khusus dan memperoleh pelayanan dan manfaat dari pemerintah.

### 3. Investor dan kreditur

Pemerintah harus memberikan informasi-informasi yang berguna kepada investor dan kreditur pemerintah pada akhirnya akan berguna untuk penilaian kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan serta memenuhi kewajiban pada komitmennya.

### 4. Pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain

Seperti para investor dan kreditur bahwa pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain menaruh ketertarikan terhadap kondisi keuangan pemerintah selain itu mereka juga menaruh perhatian terhadap rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan.

### 5. Analisis ekonomi dan keuangan

Para analisis ekonomi dan keuangan termasuk media-media keuangan menelaah, menganalisis dan menyebarkan hasil-hasilnya kepada para pemakai laporan yang lain. Mereka melakukan evaluasi masalah-masalah ekonomi dan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa beban yang diemban oleh suatu pelaporan sangat bervariasi karena makin banyak informasi yang dibutuhkan baik oleh para pengambil keputusan maupun rakyat sebagai pembayar pajak. Kebutuhan akan informasi itu dilatarbelakangi oleh tujuan-tujuan berbeda seperti ekonomi, sosial, bahkan politik.

## **2.2.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Mardiasmomemaparkan bahwa secara garis beesar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:



- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship).
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi<sup>9</sup>

Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah.
- b. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
- c. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
- d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
- e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

---

<sup>9</sup>Ibid. Hal 37

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.<sup>10</sup>

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan / ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih / kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

### **2.2.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7) Catatan Atas Laporan keuangan (CaLK).

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, lokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan

---

<sup>10</sup>Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 tentang **Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)** pengertian dari Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari / kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dana bagi hasil. (d) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

## 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

#### 4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (b) beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi

karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

#### 5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

#### 6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

#### 7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan / menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut: (a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. (b) Menyajikan informasi

tentang kebijakan fiskal / keuangan dan ekonomi makro. (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar laporan keuangan. (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. (g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

#### **2.2.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

##### **1. Relevan**

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya Informasi yang relevan adalah:

##### **a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)**

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

e. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

3. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

#### 4. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.

#### 5. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

#### 6. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

#### 7. Dapat Dipahami

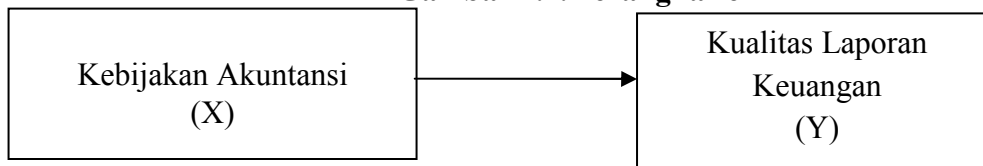
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.



### 2.3 Kerangka Berpikir dan Hipotesis

Perhatian terhadap kebijakan akuntansi semakin meningkat yang disebabkan karena memberikan cara dalam hal mengatur aktivitas ekonomi, khususnya mengenai informasi keuangan. Sasaran pilihan kebijakan akuntansi yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi pemerintah secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi, hal ini diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Maka faktor utama untuk mewujudkannya yaitu dengan penyajian laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta kualitas dari laporan keuangan daerah itu sendiri. Untuk mengetahui hasil riil dari kualitas laporan keuangan daerah itu sendiri di peroleh dengan melihat pengaruhnya pada kebijakan akuntansi laporan keuangan tersebut.

**Gambar 2.1. Kerangka Berpikir**



### 2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan pada uraian di bagian Landasan Teori, berikut adalah perumusan hipotesis.

**H<sub>0</sub>**: Kebijakan Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek Penelitian ini berfokus pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Jl.Diponegoro No. 10) dengan judul Pengaruh Kebijakan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah provinsi sumatera utara.

### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan dimensi, indikator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian ini.

Menurut Nur Indrianto Skala Ordinal adalah:

**“skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat construct yang diukur”.**<sup>11</sup>

Variable-variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menguji hipotesis adalah :

1. Kebijakan akuntansi adalah kebijakan yang dirumuskan oleh badan pemerintah, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Keuangan yang bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang memberikan cara dalam hal mengatur aktivitas ekonomi, khususnya mengenai informasi keuangan.
2. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya

38

#### **Label 3.1 Definisi Operasional Variabel**

---

<sup>11</sup>Nur Indrianto dan Bambang Supomo, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Edisi PERTAMA, Cetakan Kedua: BPFE-Yogyakarta, Edisi Kedua 2002, hal.98

No.	Variabel	Dimensi	Indikator	Alat Ukur	Skala Pengukuran
1.	Kebijakan Akuntansi (X)	Pengakuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi.</li> <li>b. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.</li> <li>c. Melakukan pemahaman dan analisa untuk melakukan proses penyesuaian dan harmonisasi sesuai kondisi dan kebutuhan pelaporan keuangan di pemerintah daerah.</li> <li>d. Menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan, dan beban sebagaimana akan dimuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.</li> </ul>	Kuesioner	Likert
		Pengukuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.</li> <li>b. Tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, periode, maupun antar entitas.</li> <li>c. Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual</li> </ul>	Kuesioner	Likert
		Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan</li> <li>b. Kebijakan akuntansi dimuat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.</li> </ul>	Kuesioner	Likert
2.	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Relevan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki umpan balik (<i>feedback value</i>)</li> <li>b. Manfaat prediktif (peramalan)</li> <li>c. Tepat waktu</li> <li>d. Lengkap</li> </ul>	Kuesioner	Likert

	Dapat Diandalkan	a. Penyajian yang jujur b. Dapat diverifikasi ( <i>verifiability</i> ) c. Netralitas	Kuesioner	Likert
	Dapat dibandingkan	a. Konsistem penerapan kebijakan akuntansi b. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan priode sebelumnya	Kuesioner	Likert
	Dapat dipahami	a. Bentuk informasi laporan keuangan disesuaikan dengan batas pemahaman para penggunanya b. Istilah informasi laporan keuangan di sesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna	Kuesioner	Likert

### 3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Mardalis “Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel”<sup>12</sup>

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah populasi sebanyak 133 orang.

**Tabel 3.2**  
**Populasi Badan Pengelola Keuangan Daerah**  
**Pemerintah Provinsi Sumatera Utara**

---

<sup>12</sup>Mardalis, **Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan Keduabelas: Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal 53

<b>No.</b>	<b>Bidang / Seksi</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
1.	Kepala Biro Keuangan	1
2.	Sekretaris Biro Keuangan	1
3.	Bidang Perbendaharaan terdiri dari: a. Kepala Bidang Perbendaharaan b. Sub Bidang TU dan Biro c. Sub Perbendaharaan Biaya Tidak langsung d. Sub Perbendaharaan Biaya langsung	1 14 12 12
4.	Bidang Anggaran terdiri dari: a. Kepala Bidang Anggaran b. Sub bidang pendapatan dan biaya c. Subbidang belanja langsung d. Sub bidang belanja tidak langsung	1 12 12 9
5.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari: a. Kepala Bidang Akuntansi b. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan c. Sub Bidang Pengeluaran d. Sub bidang evaluasi neraca dan arus kas	1 4 7 10
6.	Bidang Kas daerah terdiri dari: a. Kepala Bagian Kas daerah b. Sub bidang Pendapatan Kas c. Sub Bidang Pengeluaran Kas d. Sub Bidang Pengendalian Kas, Bank, Dan Pajak	1 5 6 4
7.	Bidang BAKK terdiri dari: a. Kepala Bidang Bagian Akuntansi b. Sub Bidang I Evaluasi APBD Kabupaten/ Kota c. Sub Bidang II Evaluasi APBD Kabupaten/ Kota d. Sub Bidang Pembinaan ADM Keuangan Daerah	1 4 4 11
<b>Jumlah</b>		<b>133</b>

Menurut Jadongan Sijabat: **“Peneliti dapat meneliti seluruh populasi disebut dengan sensus atau meneliti sebagian dari populasi di sebut Sampel”**.<sup>13</sup>

Definisi sampel menurut sugiyono :**“sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”**.<sup>14</sup>Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah teknik non probability sampling. Teknik sampling nonprobabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar atau dengan purposional sampling.

Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sampel yang benar-benar dapat mewakili (representative) dan dapat menggambarkan populasi sebenarnya. Tidak semua daerah atau kelompok populasi diteliti, cukup dua atau tiga daerah kelompok yang diambil sampelnya untuk diteliti.

Berdasarkan populasi diatas, peneliti tidak melakukan penelitian kepada semua karyawan yang berada di Badan Pengelola Keuangan Daerah. Namun, peneliti hanya mengambil sampel pada karyawan atau staff yang berada dibagian akuntansi atau keuangan saja. Hal ini dikarenakan judul penelitian ini mengacu kepada kebijakan akuntansi yang digunakan tentunya oleh bagian Badan Pengelola Keuangan Daerah tersebut.

Dalam penelitian ini kriteria pengambilan sampel adalah :

1. Kepala BPKD yang menggunakan laporan keuangan pemerintah untuk melakukan pengelolaan.

---

<sup>13</sup>**Ibid**, hal. 45

<sup>14</sup>Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Keenam Belas, 2012. hal 116

2. Pegawai bagian bidang pelaporan dan akuntansi. Maka jumlah responden yang dapat dijadikan sampel dan yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Responden**

No	Bidang / Sub	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Biro Keuangan	1
2.	Pegawai Bidang Akuntansi dan Pelaporan	23
3.	Pegawai Bidang Perbendaharaan	38
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>

Jadi jumlah responden ada 62 orang. Sampel diambil berdasarkan Purposive Sampling sebanyak 62 orang yang terdiri dengan alasan atau pertimbangan yang mengetahui atau mengerti mengenai judul skripsi yang dibuat. Kuesioner akan diberikan langsung kepada responden. Kemudian akan diterima kembali pada waktu yang disepakati responden.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari responden yang penulis gunakan, yaitu pegawai pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Melalui cara ini, peneliti memutuskan untuk terjun sendiri dalam mencari, mengumpulkan dan mengolah data untuk mendapatkan data yang relevan



dan riil. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara dengan melakukan pengelolaan kuesioner untuk mendapatkan data.

Dalam melakukan penelitian, data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data–data tersebut harus benar–benar dapat dipercaya dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi kuesioner atau seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan metode survey dengan penyebaran kuesioner kepada pengelola Laporan Keuangan Kota Medan. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui kuesioner. Pendistribusian kuesioner tersebut dilakukan secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara. Kuesioner dalam penelitian ini dirancang untuk penelitian kuantitatif. Metode ini dipilih oleh peneliti karena kuesioner merupakan mekanisme pengumpulan data yang efisien karena peneliti dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan bagaimana mengukur variabel yang digunakan.

### **3.5 Metode Analisis Data**

#### **3.5.1 Uji Reliabilitas**

Menurut Muhammad Idrus reliabilitas adalah:

**“Reliabilitas merupakan ketepatan atau *consistency* atau dapat dipercaya”.**<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Muhammad Idrus, **Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif**, Edisi Kedua: Gelora Aksara Pratama, hal 130

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ukuran reliabilitas pada umumnya dapat dilihat berdasarkan *Alfa Cronbach*. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistic Cronbach Alpha, semakin dekat Alfa Cronbach dengan 0.6 , semakin tinggi reliabilitasnya.

### **3.5.2 Uji Validitas**

Menurut Jadongan Sijabat, validitas adalah: **“Valid menunjukkan bahwa insrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur”**.<sup>16</sup>

Valid berarti insrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini (*content validity*) menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data dengan apa yang akandiukur. Biasanya digunakan dengan menghitung korelasi antarasetiap skor butir instrumen dengan skor total.

Dalam melakukan pengujian validitas, digunakan alat ukur berupaprogram komputer yaitu *SPSS for Windows 19*, dan jika suatu alat ukurmempunyai korelasi yang signifikan antara skor item terhadap skor totalnya makadikatakan alat skor tersebut adalah valid (Ghozali, 2001).

## **3.6 Uji Asumsi Klasik**

### **3.6.1 Uji Normalitas**

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data penelitian dalam masing-masing variabel telah menyebar secara normal atau mendekati data normal. Uji normalitas perlu dilakukan untuk menentukan alat statistik yang dilakukan.

Apabila data yang diperoleh itu terdistribusi normal dan variansnya sama, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan alat statistik parametrik. Jika data yang diperoleh itu tidak

---

<sup>16</sup>Ibid, hal.82

terdistribusi dan variasinya tidak sama, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan alat statistik nonparametrik. Pengujian normalitas data dilakukan dengan melihat grafik penyebaran data dan terdistribusi normal. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan Uji Kolmogorov-Smirnov.

### 3.6.2 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual, dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut Homokedastisitas. Jika varians berbeda maka disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model heteroskedastisitas.

Cara menentukan heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Uji *Spearman's rho*, yaitu mengkorelasi nilai residual (*Understandardized residual*) dengan masing-masing variabel independen. Jika signifikansi korelasi kurang dari 0,05 maka pada model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas.

### 3.7 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan regresi sederhana karena subvariabel dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen yaitu kebijakan akuntansi berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan.

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan :

**Y** : Kualitas Laporan Keuangan

**X** : Kebijakan Akuntansi

**a** : Konstanta

**b** : Slope regresi atau koefisien regresi dari X

**e** : Kesalahan residual (error term)

Persamaan tersebut diatas kemudian dianalisis menggunakan SPSS 19 dengan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Analisis hasil regresi dilakukan berdasarkan sub bab berikutnya.

### **3.7.1 Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)**

Pengujian *adjusted R<sup>2</sup>* digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. *Adjusted R<sup>2</sup>* berkisar antara nol sampai dengan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Hal ini berarti bila  $R^2 = 0$  menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila *adjusted R<sup>2</sup>* semakin besar mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila *adjusted R<sup>2</sup>* semakin kecil mendekati 0, maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

### **3.7.2 Uji Statistik t**

Uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variable Independent secara individu (*partial*) dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima
2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

